

Refreshing Coach Hakim Perikanan Perkuat Penegakan Hukum pada Korporasi



KKPNews. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal PSDKP dan Mahkamah Agung melaksanakan kerjasama dalam rangka meningkatkan kompetensi bagi para hakim ad hoc pengadilan perikanan. Hal ini dilakukan untuk mendukung upaya pemberantasan aktifitas *Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing*. Kerjasama tersebut dilaksanakan dalam penyelenggaraan *refreshing coach* bagi hakim ad hoc perikanan, yang diselenggarakan di Bandung pada tanggal 1-4 Desember 2015. Kegiatan dilaksanakan dengan tujuan menciptakan Hakim Perikanan yang memiliki kompetensi dalam penegakan hukum terhadap korporasi pelaku tindak pidana perikanan.

Direktur Jenderal PSDKP, Asep Burhanudin, dalam sambutannya menyampaikan praktek-praktek *IUU fishing* yang telah menimbulkan kerugian besar bagi Indonesia kerap kali melibatkan korporasi yang selama ini belum tersentuh dalam proses penegakan hukum tindak pidana perikanan. Oleh karena itu, melalui kegiatan ini diharapkan para Hakim Pengadilan Perikanan dapat merumuskan langkah-langkah untuk meningkatkan penegakan hukum terhadap korporasi dalam tindak pidana perikanan.

Kegiatan yang diikuti oleh 50 orang terdiri dari hakim perikanan dan hakim karir yang berasal dari Pengadilan Negeri (PN) Medan, Ranai, Tanjung Pinang, Jakarta Utara, Pontianak, Sorong, Bitung, Ambon, Tual, Merauke, dan Tilamuta, juga menghadirkan narasumber dari Mahkamah Agung, pakar hukum Universitas Padjajaran Bandung, dan Direktorat Jenderal PSDKP.